

WAWANCARA

Yappi Manafe

CAN'T
HERE TO GET
I CAN AT LAST APPEAR CLEARLY TO
NOT AS A GIAN OF MY DREAM
NOR THE DWARF OF MY
BUT AS A PERSON
PART OF THE WHOLE
WITH MY SHARE IN ITS
IN THIS ITS P
I CAN TAKE ROOT GROUND
NOT ALONE AND
AS IN ANY MOR
TO MY BUT A DEATH
SELF A LIV

Yappi Manafe

“Bangun Kesadaran dan Merubah Perilaku Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba”

Sebuah panggilan masuk membuat ponsel Yappi Manafe menyala. Saat itu, ia sedang melaksanakan tugasnya di Yogyakarta. Merasa sebuah telepon penting, buru-buru pria kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, ini mengangkatnya. Ternyata panggilan telepon tersebut berasal dari Kepala BNN, KOMJEN POL, Gories Mere, yang memintanya untuk bergabung di BNN.

“BELIAU meminta data-data saya (NIP dan CV). Saya sampaikan kepada beliau, Bapak mesti meminta langsung ke Menteri KOMINFO, Bapak Tifatul Sembiring,” ujar Yappi, menambahkan. Sebagai bukti keseriusan atas pinangannya, pihak BNN pun melayangkan permintaan formal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk “menghibahkan” pegawai terbaiknya untuk membantu tugas-tugas BNN.

Tifatul Sembiring selaku atasan tak buru-buru mengiyakan permintaan ini, dan meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk mengecek, “Apakah di situ Anda mendapatkan promosi atau tidak? Jika tidak, tidak usah pindah. Oleh karena mendapatkan promosi, akhirnya, penggemar buku dan musik ini pun diijinkan untuk bergabung dengan BNN. Persoalan tak berhenti di sini, karena Sarjana Hukum lulusan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah ini ternyata masih tercatat sebagai pegawai di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. “Di Kementerian KOMINFO saya berstatus sebagai pegawai Kementerian BUDPAR yang diperbantukan di Kementerian KOMINFO,” Yappi berterus

terang. Singkat kata, setelah melayangkan pinangan kedua ke Kementerian BUDPAR, ia pun dilantik menjadi Deputy Bidang Pencegahan BNN pada 26 Oktober 2010 lalu. Tuntas sudah pengabdianya selama 26 tahun di enam lembaga negara (Departemen PARPOSTEL, Departemen PARSENIBUD, Kementerian BUDPAR, Badan Pengembangan BUDPAR, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Departemen/Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Pelantikan para pejabat Eselon I BNN ini memiliki makna yang sangat penting bagi BNN, mengingat baru pertama kali dilaksanakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA. Dengan demikian, organisasi BNN kini telah berdiri sebagai lembaga yang utuh, karena memiliki fungsi struktural, vertikal, dan operasional, yang di-awaki oleh personel-personel yang berkompeten.

BNN sebagai penjuror dan *focal point* dalam upaya penanggulangan permasalahan Narkoba tentunya tidak dapat bekerja sendirian. Diperlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai unsur pemerintah terkait maupun elemen masyarakat untuk turut memerangi



penyalahgunaan Narkoba, melalui aspek pencegahan, terapi dan rehabilitasi maupun pemberantasan, serta kerjasama dengan seluruh stakeholder baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian diharapkan cita-cita kita untuk mewujudkan Indonesia bebas Narkoba pada tahun 2015 dapat tercapai.

Bagi Yappi sendiri, tentu ia tak mau menyalahkan amanah ini. Sederet program kerja khususnya di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba telah ia rumuskan. Apa program kerjanya di institusi yang tergolong baru bagi Yappi ini? Lalu, apa saja ide-ide yang akan dikembangkannya di masa mendatang? Berikut penuturannya kepada Tim Sinar BNN:

Menurut Anda, bagaimana mengatasi persoalan narkoba di Tanah Air?

Masalah Narkoba di tanah air merupakan masalah multidimensi dan multisektoral sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Disamping itu, masalah narkoba juga menjadi masalah internasional karena masuk kedalam kategori "organized crime dan transnational crime" yang secara internasional upaya

penganganannya dikoordinasikan oleh PBB melalui UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), sehingga diperlukan pula kerjasama internasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. BNN sebagai institusi negara yang diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), tidak dapat bekerja sendiri, harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan narkoba di tanah air. Tanpa dukungan dari seluruh stakeholder terkait, "upaya pencegahan" penyalahgunaan Narkoba oleh BNN kurang memberi dampak yang signifikan.

Solusinya?

Pertama, dari aspek "pencegahan", terkait dengan "program-program Bidang Pencegahan" yang perlu dikemas dengan baik dan tepat agar implementasi program-program Bidang Pencegahan memiliki jangkauan yang luas dan daya penetrasi sampai ke pelosok-pelosok, dan yang lebih penting lagi, program-program tersebut harus memiliki daya gugah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, sehingga

bermuaara pada terbentuknya sikap dan perilaku (yang tegas) untuk menolak Narkoba.

Kedua, dari hasil *benchmarking* di berbagai negara, ada kecenderungan program-program untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih banyak difokuskan pada program "edukasi masyarakat", oleh karena terkait dengan upaya secara berkelanjutan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta pembentukan sikap dan perilaku masyarakat terhadap bahaya Narkoba. Model pencegahan seperti ini dirasakan lebih efektif karena pertahanannya muncul dari dalam diri sendiri. Terkait hal ini, maka program-program di bidang pencegahan untuk 2011 (sambil berjalan) akan direview, program-program yang pada saat diimplementasikan nanti, ternyata memerlukan penyempurnaan akan disempurnahkan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, serta menjaga konsistensi dengan program-program BNN sebagaimana telah dituangkan di dalam RENSTRA (Rencana Strategis) BNN 2010 – 2014.

Ketiga, untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkoba, disamping upaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba, diperlukan pula upaya untuk memutuskan rantai "demand and supply". Untuk

mengurangi demand, implementasi program-program bidang pencegahan dilaksanakan dalam bentuk diseminasi informasi, serta proses advokasi yang berkelanjutan dan direplikasikan dengan basis sekolah-sekolah/universitas, keluarga, masyarakat, tempat kerja, agama, institusi, dan media. Sedangkan untuk memutuskan rantai supply, ini menjadi tugas dan memerlukan kerja ekstra keras dari para pejabat penegak hukum, disamping kerjasama internasional dengan berbagai negara.

Dari program yang ada, apa yang penting buat Anda?

Buat saya, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, kita harus mengemas program-program "pencegahan" yang tepat, dengan memperhatikan segmen masyarakat yang berbeda, serta kehidupan sosial masyarakat setempat. Pada level tertentu, respons masyarakat dan level penerimaan akan beda. Penerimaan masyarakat juga bisa berbeda antara lain karena faktor bahasa, pendidikan, serta budaya. Terkait hal ini, ada program yang bisa digeneralisir dan bisa diterapkan di semua daerah, tapi ada juga program yang tak bisa digeneralisasikan. Jadi harus diciptakan program yang disesuaikan dengan kondisi di mana program itu akan diterapkan.

Kedua, perlu perencanaan dalam menyiapkan strategi komunikasi yang efektif termasuk penyusunan pesan, pemilihan media, proses penyebaran pesan dan proses advokasi untuk memastikan pelaksanaan program-program bidang pencegahan tepat sasaran.

Program juga tidak bisa ditekankan pada program indoktrinatif?

Tidak bisa, program-program Bidang Pencegahan akan dilaksanakan dengan pendekatan

yang bersifat "menghimbau" (appeal) karena terkait dengan upaya menumbuhkan "kesadaran" dan upaya untuk "merubah perilaku" masyarakat. Contoh, dari aspek formal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara serta denda miliaran rupiah, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi kasus-kasus hukum Narkoba, dan saya pikir bagian terbesar anggota masyarakat telah mengetahui adanya ancaman

lanjutannya?

Saya dibantu oleh dua Direktur yang memiliki kompetensi dan staf-staf yang terampil untuk mendukung implementasi program-program Bidang Pencegahan ke depan. Seperti telah saya singgung, ke depan sambil berjalan program-program Bidang Pencegahan akan direview, program-program yang merupakan kelanjutan (sepanjang masih relevan) akan saya teruskan pelaksanaannya, apabila ada program yang harus disempurnakan supaya lebih efektif, ya kita sempurnakan.



hukuman tersebut, tapi kita menyaksikan kasus-kasus Narkoba tetap saja ada. Jadi disamping proses penegakan hukum (law enforcement), diperlukan metode lain untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkoba, dan salah satu metode yang akan kita terapkan adalah program "edukasi publik" (public education) yang dalam implementasinya memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan.

Bagaimana dengan program

Ada instruksi khusus dari Kepala BNN?

Kepala BNN meminta agar Deputi Bidang pencegahan dapat memformulasikan program-program Bidang Pencegahan yang komprehensif dan tepat sasaran, serta perluasan dan peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) Bidang Pencegahan.



Lalu, apa gagasan yang akan Anda kembangkan?

Gagasan yang akan dikembangkan pada tahap awal adalah bekerja sama dengan Kementerian KOMINFO untuk memanfaatkan infrastruktur TIK (teknologi informatika dan komunikasi) serta sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian KOMINFO

untuk memperluas jangkauan, penetrasi penyebaran informasi dan proses advokasi tentang bahaya Narkoba, melalui penyediaan konten-konten (terutama konten elektronik) tentang upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Kementerian KOMINFO memiliki beberapa program yang bagus, yang dapat dikerjasamakan dengan

BNN antara lain program PLIK (Pusat Layanan Informasi dan Komunikasi) di 5748 Kecamatan, Media Centre di 250 Kantor Dinas KOMINFO di Propinsi dan Kabupaten, CAP (Community Access Point) di 87 Propinsi, Kabupaten, Kota, serta MCAP (Mobile Community Access Point) di 45 Propinsi, Kabupaten, Kota. Semua infrastruktur TIK ini dapat dimanfaatkan oleh BNN melalui penyediaan konten (elektronik) yang di-up load ke infrastruktur TIK Kementerian KOMINFO. Di dalam struktur organisasi Kementerian KOMINFO juga, ada BIP (Badan Informasi Publik) yang bertugas menginformasikan seluruh kebijakan Pemerintah kepada masyarakat luas, yang juga bisa bekerjasama untuk mensosialisasikan program-program Bidang Pencegahan penyalahgunaan Narkoba ke seluruh wilayah Indonesia.

Ide kerjasama ini telah saya laporkan secara lisan kepada Kepala BNN, dan Menteri KOMINFO, dan beliau-beliau mendukung sepenuhnya.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Kementerian BUMN. BUMN memiliki dana CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga BNN bisa menitipkan program-program kampanye anti Narkoba dalam pelaksanaan program-program CSR oleh BUMN. Berikutnya, bekerjasama dengan Kementerian BUDPAR (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata) untuk menitipkan pesan-pesan anti Narkoba (yang difasilitasi oleh Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata) ke hotel-hotel di seluruh pelosok tanah air. Terkait hal ini, hotel-hotel yang bebas Narkoba akan memperoleh "reward", sertifikat yang dikeluarkan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata. Ide ini telah dibicarakan dengan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata dan beliau menyambut baik untuk

dilaksanakan.

Ke depan, kerjasama dengan stakeholder: instansi pemerintah terutama Kementerian Sosial, Kementerian DIKNAS, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian lain terkait, dan masyarakat terutama lembaga keagamaan, serta LSM terkait akan terus dikembangkan untuk menciptakan sinergi dalam upaya bersama mencegah penyalahgunaan Narkoba.

Yappi lahir dan besar di Kupang. Sebagai anak tertua dari tujuh bersaudara, ia merasakan betul kerasnya kehidupan. "Kehidupan pada masa itu memang susah sekali," katanya. Dengan niat meringankan beban orang tua yang membesarkan keenam adiknya, ia memilih untuk ikut Mama Besar (yang sudah seperti Mama Kandung) tinggal di Kampung neneknya di desa (Maulafa). Mama Besar yang saya panggil Bobe (Mama Kandung)-lah yang membesarkan saya.

Sebagai anak sulung, ia berkeinginan untuk dapat mengubah nasib ekonomi keluarga. Bercita-cita ingin menjadi seorang yang bisa berbuat sesuatu dan bekerja supaya dapat hidup lebih layak, maka dengan pengorbanan orang tua yang luar biasa serta dukungan adik-adiknya, ia dapat melanjutkan pendidikan tingginya Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Selepas kuliah, ia melanjutkan petualangannya ke Jakarta, pada 1983. Melamar pekerjaan ke sana-ke mari, ia pun diterima menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Dep. PARPOSTEL) pada tahun 1984, yang saat itu dipimpin Ahmad Taher. "Pada awalnya saya ditempatkan di Biro Hukum dan Organisasi," kata pria

berkacamata ini.

Selama 26 tahun berkarier, ia mengalami mutasi dan menempati sejumlah posisi di Departemen, Kementerian. Era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Dep. PARPOSTEL bubar dan Ditjen Postel masuk ke Dephub, lalu dibentuk Departemen PARSENIBUD. Setelah menjadi Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri di Departemen PARPOSTEL, lalu menjadi Tenaga Analis Kerjasama Multilateral pada Departemen PARSENIBUD, dan ia pun dipromosi menjadi Direktur Promosi Pariwisata di Badan Pengembangan BUDPAR, Kementerian BUDPAR. Menjelang bubarnya Badan tersebut, ia diminta pindah ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang saat itu dipimpin Syamsul Mu'arif. "Saya menjadi Asisten Deputi Urusan Perundang-undangan Telematika," katanya.

Selepas Pemilu 2004, Kementerian Komunikasi dan Informasi berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Dr. Sofyan Djalil, dan Yappi menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan. Dalam perjalanan terjadi resuffle Kabinet, Prof. Dr. Muhammd Nuh menggantikan Dr. Sofyan Djalil sebagai Menteri KOMINFO, dan Yappi beralih jabatan menjadi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri sampai ia meninggalkan Kementerian KOMINFO untuk melanjutkan

tugasnya di BNN. "Total saya sempat dipimpin oleh 11 Menteri di enam Departemen/Kementerian," tutur Yappi, sembari tersenyum.

Lalu, apa indikasi keberhasilannya?

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba tidak bisa dilaksanakan sekali saja langsung tuntas, karena masalah Narkoba merupakan masalah yang multi dimensi, maka upaya pencegahannya perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tidak dapat diberantas sampai tuntas (artinya hilang sama sekali), ini tidak mungkin, dan secara internasional hal ini diakui, tetapi melalui kerjasama dengan seluruh



pemangku kepentingan (termasuk masyarakat) kita bisa menekan, mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Indikasi keberhasilannya dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif kita melihat antara lain melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba, peningkatan perubahan perilaku yang secara tegas menolak Narkoba. Secara kuantitatif tergambar antara lain dari menurunnya prosentase jumlah pemakai, pengguna, menurunnya kasus Narkoba, meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang menolak Narkoba.

Apa manajemen kerja yang Anda terapkan?

Dalam manajemen kerja saya, saya memiliki prinsip bahwa suatu keberhasilan bisa dicapai karena karya kita semua. Karena itu, saya bersama Direktur-Direktur dan seluruh staf Bidang Pencegahan akan bekerja sebagai sebuah Tim yang solid dan saling mendukung,

berkoordinasi dengan Bidang-Bidang lain (di BNN) yang terkait terutama Bidang Pemberdayaan, Bidang Terapi dan Rehabilitasi, Bidang Kerjasama untuk mensinergikan pelaksanaan program-program Bidang Pencegahan dengan Bidang-Bidang tersebut.

Bagaimana dengan anggapan BNN belum bisa berbuat banyak?

Saya pikir, sudah banyak keberhasilan yang dicapai oleh BNN, masalahnya karena masyarakat tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan BNN selama ini. Oleh karena itu, ke depan, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh BNN dalam melaksanakan TUPOKSI BNN harus dipublikasikan secara luas (media press harus diajak), sehingga masyarakat luas dapat memahami tugas-tugas BNN serta mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh BNN sejauh ini (bukan di internal BNN) tapi di masyarakat, bahkan BNN telah melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Capaian terhadap target-target

jangka pendek atau yang bersifat interim perlu diinformasikan juga kepada masyarakat. Dengan demikian, eksistensi BNN akan disikapi secara positif oleh masyarakat dan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai BNN akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Apa harapan Anda ke depan?

Data yang saya kutip dari RENSTRA BNN 2010 – 2014 menunjukkan jumlah pecandu, korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3.6 juta orang. Dari angka tersebut, 90% penyalahguna Narkoba coba pakai berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa, 60% penyalahguna pemakai teratur berasal dari kalangan bukan pelajar/mahasiswa, dan 88% pecandu berasal dari kalangan bukan pelajar dan mahasiswa. Dari sisi pencegahan, sejauh ini kader-kader anti Narkoba yang dibentuk oleh BNN baru berjumlah 29.960. Pada tahun 2011 direncanakan jumlah kader anti Narkoba yang terbentuk bertambah 3.430 kader. Saya pikir harapan saya sama juga dengan harapan semua pihak yang memahami bahaya penyalahgunaan Narkoba, yaitu semua pihak bisa bekerjasama, bahu-membahu untuk menurunkan tingkat pecandu, penyalahgunaan Narkoba dan menurunkan peredaran gelap Narkoba, yang tercermin dari menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba menjadi di bawah 1.5%, karena tercapainya sasaran ini, akan membebaskan Indonesia dari Narkoba pada tahun 2015 (*dalam arti seluruh masyarakat sadar dan memahami bahaya penyalahgunaan Narkoba*). Untuk merealisasikan harapan ini, butuh kerja keras yang luar biasa dari semua pihak terkait khususnya BNN. 🌐

